

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

Untuk menjawab topik mengenai partai politik tentu tidak terlepas dari proses penjarangan rekrutmen dan sistem kaderisasi anggota untuk bergabung dalam suatu partai. Sekumpulan partai politik saat ini tengah berlomba lomba merekrut kader untuk tujuan mengembangkan partai politiknya dan untuk bisa membawa/ mengusung calon pemimpin baru di kursi pemerintahan dengan cara mendapatkan suara masyarakat di pemilu atau pilkada terutama kaum muda yang tengah menjadi sasaran. Kader yang sudah tergabung tentunya akan menjadi penyalur aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan, saat ini partai politik tengah menjangir kader baik dari tokoh masyarakat, kalangan NU Muhammadiyah, mahasiswa, kaum muda, dll yang berkualitas untuk pengisian jabatan publik maupun keberhasilan partai memperoleh suara.

Sebagaimana ayat Al-Quran menerangkan sedikit tentang pemimpin yang harus memiliki sifat amanah/ dapat dipercaya sangat penting bagi seorang kader, sifat amanah dapat membawa seseorang kejalan yang benar atas ridho Allah SWT, jika seorang kader atau pemimpin tidak amanah dalam menjalankan tugas menjadi pemimpin maka akan merugikan anggota yang dipimpinya. Diibiratakan dalam organisasi jika seorang kader tidak amanah maka akan memberikan dampak pada seseorang yang dipimpin, selain amanah seorang kader juga harus bersifat adil seperti dalam ayat Al-quran surah An-nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat". (*An-nisa': 58*).

Sehingga penulis memiliki ide untuk mengangkat judul Open Rekrutmen dan Sistem Kaderisasi Partai Islam (Studi Komparasi DPC PKB dan DPD PKS di Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2021). Dengan peneliti membandingkan 2 partai yang diangkat, penulis merasa paham mana kaderisasi yang baik dan layak mengusung calonnya menjadi pemimpin di jabatan pemerintahan. Hal ini berarti memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan rekrutmen kaderisasi dari partai politik Islam, adapun yang dibahas peneliti fokus fraksi PKB dan PKS yang ada di kabupaten Grobogan dengan berbagai konsep teori yang telah ditentukan:

#### 1. Partai Politik

Pendefinisian partai politik menurut para ahli<sup>1</sup>:

- a) Menurut Carl J Friedrich, partai politik merupakan sekelompok manusia yang telah diatur secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi pemimpin partai dan dari penguasaan tersebut diberikan pada anggota partainya dan memberikan kemanfaatan yang bersifat Ril / materil.
- b) Menurut Max Weber partai politik merupakan organisasi publik untuk membawa pemimpinannya berkuasa dan mengizinkan para pendukungnya memperoleh keuntungan dari dukungan tersebut.
- c) Menurut Miriam Budiardjo partai politik merupakan kelompok yang telah disusun dan anggotanya memiliki perkembangan dari nilai dan cita yang sama untuk mendapatkan dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional sebagai pelaksanaan programnya.
- d) Menurut Ramlan Subakti partai politik merupakan suatu anggota yang tersusun stabil untuk dipersatukan dan dimotivasi ideologi tertentu sebagai usaha dalam mempertahankan kekuasaan pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah disusun<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, "*Dasar Dasar Ilmu Politik*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000), Hlm, 161-162.

<sup>2</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, "*Pengantar Ilmu Politik*", (Malang: Intans Publishing, 2015), hlm, 356-357.

Dari berbagai pengertian partai politik yang telah dikemukakan ada tiga prinsip dasar partai politik yakni<sup>3</sup>:

Sebagai koalisi, partai politik membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membentuk kekuatan mayoritas, suatu partai dibangun dari kualitas fraksi-fraksi. Kehadiran fraksi dalam partai sering mengacaukan kesatuan partai karena satu sama lain berusaha menjadi dominan dalam partai. Ketidakcocokan dalam partai muncul dalam penetapan atas perjuangan, program kepemimpinan organisasi dan pencalonan kandidat.

Sebagai organisasi, partai dibangun dan dibesarkan sebagai tempat perjuangan dan perwakilan dari sejumlah kelompok atau orang. tugasnya mencalonkan anggota pemilu dengan mengusung partai yang diikuti, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu informasi yang mempengaruhi masyarakat dalam kampanye. Untuk itu partai politik melakukan pengarahannya kepada anggota-anggotanya untuk mengabdikan kepada partai.

Sebagai pembuat kebijakan, partai politik mendukung calon yang ditunjuk untuk menduduki jabatan publik, dari posisi tersebut anggota partai memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi seseorang/ kelompok lingkup kekuasaannya serta memberi pengaruh terhadap pengambilan kebijakan, dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kerjasama partai.

Kehadiran partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik. Adapun menurut Dwight King, peran utama parpol ada tiga yakni, menjadi penghubung lembaga antara masyarakat dan pemerintah, menghasilkan kebijakan yang diberikan pada rakyat sebagai pemilih dan dilaksanakan pemerintah melalui hasil pemilu, jalan bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi mengisi jabatan publik<sup>4</sup>.

Dari keseluruhan definisi partai politik dan fungsi partai politik diatas peneliti menyimpulkan partai politik merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas memperjuangkan nilai, ideologi dan fungsi dengan prinsip

---

<sup>3</sup> Hafied Cangara, "*Komunikasi Politik: Konsep, Teori Dan Strategi*", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009) , Hlm 168-169.

<sup>4</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, "*Pengantar Ilmu Politik*", (Malang: Intans Publishing, 2015), hlm, 362-366.

kepemimpinan, keanggotaan, pelaksanaan melalui kekuasaan yang diperoleh dalam pemilu. Dan fungsi dari partai politik secara umum yakni: Komunikasi politik diartikan sebagai sarana penghubung yang memerintah/pemerintah dan yang diperintah/ masyarakat. fungsi dari komunikasi politik untuk merumuskan kepentingan, mengumpulkan dan menyalurkan kepentingan masyarakat kepada pemerintah melalui saluran yang tersedia. Sedangkan dari pihak lain yang bersangkutan dengan pemerintah memberikan penjelasan dan menyebarkan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi politik adalah menjelaskan ajaran partai dari kebijakan pemerintah oleh masyarakat luas, proses sosialisasi politik membentuk sikap seseorang pada isu politik yang terjadi, proses sosialisasi politik berjalan dalam rentan waktu yang lama. Proses tersebut diperoleh seseorang dari pandangan, informasi, nilai masyarakat melalui pendidikan partai politik, nilai ideologi dan kesetiaan pada negara dan partai<sup>5</sup>. Pengatur konflik ketika terdapat perbedaan dan persaingan pendapat yang menimbulkan konflik sosial, partai sebagai pengatur konflik maka partai politik harus melakukan agregasi kepentingan yang ada untuk menghilangkan persaingan masyarakat kemudian menyalurkan melalui saluran yang tersedia. Pembuat kebijakan ketika sudah mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan di lembaga eksekutif dan legislatif melalui pemilu maka partai politik memiliki wewenang mengambil dan mengeluarkan kebijakan sesuai ideologi dari partai politik. Sehingga partai politik mampu mempengaruhi kebijakan para elit melalui kader yang telah menduduki lembaga eksekutif/ legislatif.

## 2. Pendefinisian Partai Politik Islam<sup>6</sup>

Partai islam merupakan partai yang memiliki 2 makna yakni sebagai *ideologi organisasi* yang artinya islam sebagai dasar ideologi, tujuan menjadikan islam sebagai ideologi karena hal tersebut menjadi pembeda antara partai satu dengan lainnya. Makna kedua sebagai *basis sosio*

---

<sup>5</sup> M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik 1*, Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, pertama (Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015). Hlm. 35-38.

<sup>6</sup> Ridho Alhamdi, "*Partai Politik Islam Teori Dan Praktik Di Indonesia*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm. 6-21.

*kultural* yang artinya partai politik tidak hanya sebagai organisasi namun juga sebagai sarana media memperjuangkan dan mengekspresikan kepentingan politik kepada masyarakat/ kelompok. Ada 3 kategori partai islam yaitu partai islam yang berasas islam, partai islam yang berasakan islam dan pancasila, partai islam yang berasaskan pancasila tetapi berbasis massa dengan mayoritas dari kaum muslim.

Prinsip dasar partai islam sendiri berpedoman pada nilai universal Al-Quran dan As-Sunnah yang artinya semua aktivitas partai dan keputusan dari organisasi tidak boleh bertentangan ajaran islam harus berpedoman Alquran dan Assunnah. Musyawarah artinya setiap keputusan harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan pengurus dan anggota partai melalui musyawarah sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, oleh karena itu sifat partai islam adalah kolektif koligeal (segala kebijakan diputuskan bersama sama). Bersifat adil, masing masing partai untuk setiap anggota dan pengurus mempunyai hak dan aturan yang sama, sehingga masing masing partai yang berlaku tidak merugikan salah satu pihak/ pihak lain. Toleransi, dalam perbedaan dan perpecahan setiap manusia pastinya memiliki perbedaan yang bisa mengakibatkan perpecahan. Islam tidak mengajarkan perpecahan yang berakibat hancurnya iman dan moral manusia, perbedaan tersebut harus diminimalisir jika perlu dihilangkan sehingga dapat terciptanya perbedaan antara kedua belah pihak.

Islam memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari partai lain, dari asas dan ideologi partai islam berpegang pada ajaran kitab suci. Partai islam memiliki cita cita menjadikan Indonesia sebagai negara islam dengan mayoritas beragam kelompok muslim baik abangan, muslim taat dan muslim elit. Oleh karena itu partai islam memiliki basis yang berbeda beda yakni PKB dan PPP memiliki pendukung dari kelompok NU, PAN memiliki pendukung dari kelompok Muhammadiyah dan PKS memiliki pendukung dari kelompok gerakan tarbiyah di perkotaan.

Ada tiga tipologi partai politik islam yakni partai tradisional, partai modernis, dan partai islamis dengan masing masing pendukung dan relasi yang berbeda beda: Partai islam tradisional diperuntukkan pada kondisi masyarakat yang adat dan istiadatnya masih diyakini secara



turun menurun, partai islam tradisional merupakan partai islam yang tradisi islamnya masih kental khususnya di desa atau pedalaman dengan berbasis dan pendukung dari kaum muslim. Kelompok dari partai islam tradisional ini tumbuh dan berkembang di kalangan pesantren yang merujuk pada organisasi islam terbesar yakni Nahdhatul Ulama/ NU dengan partai yang mendominasi adalah PKB dan PPP.

Partai islam modernis, partai islam modernis merupakan partai islam yang diperuntukkan untuk masyarakat muslim yang sudah berkembang di perkotaan, partai ini masyarakatnya patuh dan taat pada tradisi islam dan tidak mudah dipengaruhi orang/ kelompok lain karena memiliki pola pikir rasional, ekonomis, dan pragmatis dari tingkat pendidikan yang lebih maju. Secara kultural organisasi masyarakat islam yang mendominasi dari Muhammadiyah dengan partainya PAN.

Partai islamis, partai islamis merupakan partai yang berpedoman islam dengan ajaran ideologinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, partai islamis basis yang dimiliki dari kelompok islam militan dan ideologis, sebagian besar riwayat pendidikan dari kelompok ini mantan aktivis mahasiswa dari dakwah kampus juga elit dari timur tengah, basis pendukung partai ini dari generasi muda dipertanian, dengan partai yang mendominasi yakni PKS dengan kelompok dari gerakan tarbiyah, FPI, NU garis keras dll.

Peneliti menyimpulkan bahwasannya partai politik dengan partai politik islam secara keseluruhan kurang lebih memiliki fungsi, tujuan dan arti yang sama, namun yang membedakan adalah asas dan ideologinya. Fokus pada penelitian ini partai politik islam merupakan suatu struktur organisasi yang berideologi islam sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan mengumpulkan massa untuk menyebarkan nilai, ideologi, serta memperjuangkan kepentingan nasional melalui kontestasi pemilu.

### 3. Pendefinisian Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan bagian dari aspek partai politik. Rekrutmen partai politik merupakan proses pemilihan anggota untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan pemerintahan maupun politik. Definisi lain dari rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian masyarakat dalam aktivitas politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan, kinerja dan kepribadian dalam bentuk

media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri dari jabatan tertentu dan sebagainya. Fungsi rekrutmen partai politik menjadi fungsi khusus dalam memonopoli partai politik.

Rekrutmen politik memaparkan hal mengenai dinamika politik partai: *Pertama*, rekrutmen partai politik menunjukkan kekuasaan politik yang sebenarnya, dengan kata lain apakah partai politik nantinya bersifat oligarkis/ menyebar. Dalam penjelasannya kekuasaan yang terkonsentrasi pada pimpinan elit partai yang tersebar dalam struktur tingkatan paratai, lembaga partai, fraksi internal, dan anggota partai. *Kedua*, rekrutmen politik menafsirkan perjuangan kekuasaan internal partai politik. Perjuangan fraksi partai politik terlihat dari rekrutmen politik yang menjadi perdebatan eksistensi anggota dan fraksi partai politik dengan tujuan menambah luas kekuasaan. *Ketiga*, rekrutmen partai politik menjadi perwakilan untuk melahirkan kader partai politik. Anggota yang sudah direkrut partai pada dasarnya mempresentasikan kerjasama bermasyarakat untuk menghasilkan nilai tambah. *Keempat*, rekrutmen politik menjelaskan bagaimana pertukaran elit terjadi. *Kelima*, rekrutmen politik menjadi figur partai di kawasan masyarakat. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya dan kemampuan politiknya. *Kelima*, rekrutmen politik berada diantara penjelasan tipe kepartaian, apakah partai termasuk dalam partai kartel, catch all, kader dan massa<sup>7</sup>.

Prinsip prinsip dalam rekrutmen proses kandidasi: *Pertama*, loyalitas kesetiaan dalam partai. Dengan adanya loyalitas para politisi akan memahami jati dirinya didalam partai berupa pengalaman, karier dan kontribusinya di partai politik. Rekrutmen pada pengurus dan pejabat publik perlu memberikan kesempatan pada kader lama berjuang dalam partai. *Kedua*, bersih. Kader, anggota, pengurus partai merupakan politisi yang akan mewakili masyarakat jadi mereka harus berperilaku baik, tidak melakukan tindakan tercela, tidak melanggar norma sosial, agama, politik. Dalam proses rekrutmen, partai politik harus membenahi

---

<sup>7</sup> Sigit Pamungkas, “*Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia*”,(Yogyakarta: Institute For Democracy And Welfarism (IDW), 2011), Hlm. 90-108.

organisasinya dari para politisi tercela dan merekrut kader yang bersih. *Ketiga*, terbuka. Perlu adanya transparansi dalam proses rekrutmen pengurus dan pejabat publik baik dari keterbukaan mekanisme rekrutmen, keterbukaan profil politisi dan partai politik, kualitas politisi dalam pendidikan dan kemampuan ekonomi. *Keempat*, akuntabilitas. Artinya proses rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota partai dan masyarakat, proses rekrutmen secara terbuka partai memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyeleksi mekanisme calon. Sehingga partai politik dan masyarakat akan berupaya menampilkan individu berkualitas yang mampu membesarkan partai dan lainnya. *Kelima*, meritokrasi. rekrutmen pertama seleksi anggota partai ditentukan pada keahlian dan kematangan ideologinya, kemudian untuk seleksi pengurus ditentukan pada pengalaman berorganisasi, kecakapan dalam sikap, perbuatan, dan keahlian. Sedangkan pejabat publik rekrutmennya didasarkan pada kemampuan kepemimpinan, wawasan dan pengetahuan yang luas dalam pemahaman birokrasi.

*Keenam*, demokratis. Proses rekrutmen diartikan sebagai perluasan partisipasi dimana proses penyeleksi mengikuti perubahan metode seleksi kandidat yang lebih selektif dalam menerima individu/ kelompok dari luar, dan tidak ditentukan oleh elit, anggota yang terlibat nominasi, persamaan derajat. *Ketujuh*, decentralized/ autonomus. Wewenang pengurus partai di tingkat pusat dan daerah dalam penentuan kandidat seleksi caleg seharusnya dilakukan dengan seimbang yang artinya seleksi kandidat tidak dapat dilakukan oleh pengurus partai daerah tanpa intruksi dari pimpinan pusat partai. Begitupun menentukan kandidat politisi tidak dapat dilakukan pimpinan pusat partai tanpa pertimbangan anggota dan pengurus partai ditingkat daerah. *Kedelapan*, kecukupan pembiayaan. Dukungan financial sangat diharapkan dalam menjaring anggota baru dengan cara iuran rutin dari anggota sebagai upaya memperbesar jangkauan pembiayaan, dan berlaku untuk caleg yang akan duduk dilembaga pemerintahan. Terutama jaminan pembiayaan kampanye caleg secara mandiri, kecukupan pembiayaan partai politik otomatis terjaga jika anggota, kader, pengurus, dan pejabat publik/ wakil partai memberikan kontribusi dana secara regular. *Kesembilan*,



humanis. Keterbukaan rekrutmen berdasarkan pada siapa saja yang mendaftar tanpa memandang status sosial ekonomi, prinsip tersebut menekankan pada hasil dan manfaat dari rekrutmen yang dapat memahami keadaan lingkungan sosial, kemiskinan, terutama kaum minoritas. *Kesepuluh*, non partisipan. Tim peneyeleksi memperlakukan hak yang sama dalam melakukan seleksi pengurus, caleg, dan calon pejabat lainnya, tim peneyeleksi tidak boleh mendiskriminasi dan memberikan perlakuan istimewa pada calon yang memiliki kekerabatan dengannya.

Ruang lingkup dalam rekrutmen politik yang ideal ada 3 yakni: *Pertama*, tahap sertifikasi (siapa yang menjadi anggota partai politik) dengan kriteria merupakan penetapan yang diberikan partai politik terhadap seorang kader untuk menunjukkan apakah kader tersebut layak dalam melakukan tugas, kandidat meliputi aturan pemilihan, aturan partai, norma sosial informal. *Kedua*, siapa yang layak menjadi pengurus partai politik dalam tahap penominasian/ pemilihan dimana kesiapan calon telah memenuhi syarat dan permintaan dari peneyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan/ dipilih. *Ketiga*, tahap pemilu, tahap terakhir yang menentukan siapa yang pantas dicalonkan menjadi calon legislatif/ pejabat untuk memenangkan pemilihan umum. Terdapat 4 hal dari pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik:

- a) Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (candidacy)?.
- b) Siapa yang meneyeleksi (selectoraty)?.
- c) Diamana kandidat diseleksi?.
- d) Bagaimana kandidat diputuskan?.

Keempat pengorganisasian partai politik tersebut akan melahirkan model pengelolaan partai secara inklusif atau eksklusif, kemudian metodel seleksi kandidat yang sentralistik atau desentralistik, demokratis atau otoriter, dan model proses seleksi informal terpusat/ informal regional, informal terlokal, formal terpusat/ formal regional.

Pertama, terkait siapa yang dicalonkan dalam rekrutmen politik sesuai dengan tingkat inklusifitas (pemilih dapat menjadi kandidat partai berdasarkan regulasi yang ditetapkan pemerintah) atau eksklusifitas (pembatasan pemilih dalam seleksi kandidat), partai politik memberikan persyaratan sesuai ketentuan negara dimana bagi setiap individu dapat mencalonkan dirinya dengan persyaratan

umum seperti jumlah usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, deposito uang dan jumlah dukungan.

Lalu siapa yang menyeleksi (selectoraty)?, penyeleksi yang dimaksud adalah lembaga yang menyeleksi kandidat, lembaga tersebut berupa satu orang, atau banyak orang sampai pada pemilih yang berdasarkan pada tingkat inklusivitas (pemilih mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum) sebaliknya tingkat eksklusivitas (penyeleksi dalam proses kandidasi ditentukan pimpinan partai).

Agen dalam pembuatan keputusan berdasarkan pada dua dimensi yakni secara formal/ informal dengan tipe model proses seleksi yakni informal terpusat adalah mekanisme rekrutmen politik secara demokratik konstitusional namun praktek proses rekrutmen disesuaikan dengan budaya masyarakat yang patronase kepemimpinan dimana hanya membutuhkan pemimpin untuk mengayomi agar kebutuhan terpenuhi. Tanpa tradisi demokratis di internal partai maka pengorganisasian partai menjadi longgar dan anggota partai dalam peranannya sangat terbatas. Kedua, informal regional. Pimpinan fraksi melakukan negosiasi dengan yang lain untuk menempatkan kandidat pilihannya di jabatan terbaik. Ketiga, informal terlokal. Penguasa lokal memutuskan prosedur umum dalam rekrutmen politik tanpa panduan yang memungkinkan berubah ubah sehingga rawan dimanipulasi kelompok kecil. Keempat, formal terpusat dan regional. Partai pusat memiliki otoritas dalam memutuskan kandidat dan penempatan. Kelima, formal terlokal. Aturan konstitusi dan panduan dimapankan untuk menstandarkan proses rekrutmen sistem ini dapat memungkinkan proses transparan dan aturan yang adil.

Permasalahan ketiga dimana kandidat diseleksi, ketika kandidat secara eksklusif oleh penyeleksi partai dalam tingkat nasional tanpa adanya serangkaian tindakan yang mengikutinya, hal ini disebut dengan metode sentralistik (penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan kepada pemerintah pusat). sedangkan metode desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat pada daerah otonom berdasarkan asas otonomi) kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal/ kelompok sosial intra partai.

Permasalahan terakhir ada 2 sistem bagaimana kandidat diputuskan yakni model pemilihan vs penunjukan. Dalam sistem pemilihan pengusulan kader melalui pemilihan tahap penyeleksi, sistem pemilihan secara asli kader diseleksi melalui tahapan pemilihan baik tanpa seorang penyeleksipun, yang dapat mengubah daftar penempatan kandidat. Sementara pada sistem penunjukan penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan, kandidat akan ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan pihak partai kecuali pengusulan oleh partai dan pemimpin partai.

Terdapat 2 faktor rekrutmen politik yakni faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi seleksi kandidat, terdapat faktor yang berasal dari internal-Formal internal-informal, eksternal-informal, eksternal-formal, faktor tersebut yang mempengaruhi nilai pilihan model seleksi kandidat. 1) internal-informal, dalam faktor ini mempengaruhi seleksi kandidat meliputi perjuangan kekuasaan diantara fraksi, elit partai, ide, ideologi partai dan etos budaya partai. Hal tersebut membuat pertempuran dari tawar menawar kekuasaan antara elit fraksi sehingga terjadi perubahan aturan seleksi kandidat, fraksi partai politik sering muncul kepermukaan untuk mempertahankan kepentingannya. 2) Internal-formal, tingkatan dan bentuk pengorganisasian partai menentukan model seleksi kandidat, dicontohkan oleh field dan siafelis mengutip epstein partai berbasis keanggotaan yang luas mendorong ketertiban anggota dalam proses seleksi kandidat. 3) eksternal-formal, yang menyatakan institusi negara dan lingkungan legal. Pada sistem pemilu banyaknya kursi jabatan yang diperebutkan diwilayah pemilihan, penghitungan perolehan kursi, penetapan calon, kuota kandidat, dan pendanaan kampanye yang mempengaruhi seleksi kandidat. 4) eksternal-formal, yang mempengaruhi faktor tersebut adalah kesempatan pada ketidakpastian politik, pembangunan sosio ekonomi, besaran partai untuk sukses pemilu, dan kompetisi antar partai.

#### 4. Pendefinisian Kaderisasi<sup>8</sup>

Kepemimpinan dan kaderisasi keduanya berkaitan dengan pengembangan organisasi yang sangat penting dalam sebuah lembaga/ organisasi karena kaderisasi menjadikan terbentuknya kepribadian yang berintegritas yang menggerakkan dan mempersiapkan pemimpin di masa depan. Fungsi dari kaderisasi mencetak calon melanjutkan perjuangan organisasi dengan menjadi calon pemimpin di masa depan. Dalam menggerakkan organisasi kaderisasi merupakan gerakan kebangsaan karena menumbuhkan bibit dan menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan. Alasan kaderisasi kepemimpinan sangat dibutuhkan karena pemimpin saat ini maupun sesudahnya sudah pasti akan mengakhiri kepemimpinannya baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan.

Faktor dari kaderisasi sangat dibutuhkan dengan adanya ketentuan periode jabatan kepemimpinan diorganisasi, seperti adanya penolakan dari anggota kelompok yang menginginkan pergantian kepemimpinan, proses alami dengan berkurangnya muda menjadi tua sehingga kehilangan kapasitas dalam memimpin. Sehingga faktor kaderisasi membentuk perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan di masa mendatang.

##### a) Pengertian Kaderisasi

Menurut kamus ilmiah, definisi kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tombak perjuangan dari partai politik, organisasi, atau lembaga. Kader diartikan di istilah lain merupakan sebagian orang yang diharapkan dapat memegang dan meneruskan kedudukan dan kewajiban yang penting dalam sebuah organisasi. Proses dari kaderisasi terbagi menjadi dua macam yakni kaderisasi formal dan informal.

Kaderisasi informal adalah proses menyiapkan calon pemimpin yang tidak terencana secara sistematis, kaderisasi informal bisa dikatakan sebagai proses pendidikan yang dilakukan sehari-hari dan dimulai sejak

---

<sup>8</sup> Syamsudin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*, ed. by Bhakti Ikrar Nusa dan Nurhasim Moch, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepuitan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), 2016). Hlm. 50-59.

dini seperti belajar disekolah, pendidikan yang diajarkan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Proses ini sebagai pendewasaan diri untuk menumbuhkan akhlak dan sikap yang positif dari kepribadian seseorang dalam jangka waktu lama. Dari proses kaderisasi informal menjadikan calon pemimpin yang baik dari segi kesetiaan, gigih dalam bertindak dan pengabdianya dalam organisasi.

Kaderisasi formal merupakan rencana yang bersifat sistematis, terarah dan kelembagaan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku diorganisasi tersebut. Kaderisasi yang mempersiapkan calon pemimpin yang dilakukan dengan terencana secara sistematis mengikuti aturan tertentu tentang kepemimpinan dalam jangka waktu tertentu. Proses kaderisasi sebagai proses menggerakkan seseorang diorganisasi guna memiliki tujuan yang sama demi melanjutkan ideologi partai politik.

b) Tujuan Kaderisasi

Ada 4 hal tujuan kaderisasi: pertama, memperoleh pengetahuan tentang nilai, ideologi, visi misi partai yang diperjuangkan, artinya ideology partai menjadi dasar visi misi organisasi itu dibentuk. Kedua, menumbuhkan militansi artinya semangat dalam membina dan memperjuangkan organisasi dengan cara penanaman ideologi pengkaderan sesuai tahapan dari organisasi. Ketiga, upaya dalam meningkatkan kemampuan kader partai dalam tata usaha partai politik yang akan menduduki jabatan legislatif dan pemerintahan. Keempat, kaderisasi memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki partai politik dalam menduduki jabatan yang strategis.

c) Pentingnya Kaderisasi

Kaderisasi bisa dikatakan kelanjutan perjuangan masa depan partai, tanpa adanya kaderisasi partai politik tidak mampu bergerak melaksanakan tugas wakil rakyat dengan baik. Fungsi dari kaderisasi salah satunya menciptakan calon pemimpin untuk mengelola masa depan partai, partai seharusnya melakukan pembinaan kader secara sistematis dan terstruktur di wilayah kader yang mencakup:



Terdapat aturan dan tata organisasi untuk membangun sistem pengkaderan baik pengkaderan secara umum dan khusus, terdapat model rekrutmen terbuka dan demokratis, adanya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkelanjutan, menciptakan jaringan kinerja kader lewat hubungan antar kader untuk meningkatkan kualitas kader sehingga mampu melahirkan kader yang konsisten dan berdedikasi tinggi, perlu adanya *affirmative action* untuk merekrut dan melaksanakan model pembinaan kader perempuan demi memajukan jumlah perempuan di partai politik, baik jabatan publik/ diparlemen. Serta bagi kaderisasi dalam kelompok perempuan mampu meningkatkan ketrampilan dan kemampuan terkait perannya dipartai politik dan jabatan pemerintahan, pola pembinaan kader perempuan dari strategi pembinaan, materi dan metode pembinaan seharusnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perempuan di partai politik.

d) Prinsip Kaderisasi

*Prinsip terbuka*, artinya bahwa setiap anggota partai memiliki kesempatan yang sama dalam proses kaderisasi seperti pelatihan dan yang berhubungan dengan kegiatan partai. Kaderisasi harus dilakukan oleh seorang kader yang sudah melewati proses awal baik yang telah menjadi anggota partai politik, ataupun anggota dari sayap partai dengan penilaian potensi dari partai politik yang sudah ditetapkan. Proses kaderisasi bersifat demokratis dalam pelaksanaan mengikuti jenjang pengkaderan, sistem persaingan secara sehat dan terbuka di tubuh partai harus terlihat. Seorang kader harus membiasakan diri bersaing secara sehat dan terbuka, karena persaingan tersebut dapat memunculkan calon pemimpin yang berkualitas terbebas dari kolusi dan nepotisme.

*Non deskriminatif* artinya memberikan ruang dan mekanisme yang sama bagi semua anggota dalam proses kaderisasi untuk mengikuti dan memperoleh promosi jabatan politik sesuai tahapan kaderisasi tanpa adanya perbedaan agama, golongan, gender, ras dan suku. Dalam kaderisasi prinsip non deskriminatif dapat mencegah adanya bentuk pemerintahan dan kekuasaan politik yang dipegang elit kecil dari masyarakat dengan membedakan

kekayaan dll terkait kandidasi kontestasi pemilu legislatif di jabatan publik.

*Berjenjang*, kaderisasi partai dilakukan secara berjenjang, bertahap, dan bertingkat mulai dari kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjut. Mekanisme penjenjangan secara rasional dilaksanakan sebagai upaya pentahapan materi kaderisasi dan pentahapan jabatan organisasi yang bersifat pyramid/ bertingkat. Model penjenjangan dapat mewujudkan kehidupan internal partai, hal ini karena materi kaderisasi diumpamakan skema piramidial bahwa setiap kader partai mempunyai tingkat kapasitas standarisasi yang sama dalam proses kaderisasi. Penjenjangan kaderisasi merupakan syarat untuk meniti posisi karir diorganisasi ditingkat lokal atau pusat dengan contoh misalnya tingkat kaderisasi harus diikuti calon ketua partai, sekertaris dll. Keduanya sangat berkesinambungan karena materi kaderisasi secara otomatis dapat berpengaruh pada jenjang karir politik yang dicapai para politisi, sebagai perumpamaan ketika seorang anggota melaksanakan kaderisasi tingkat pertama maka karir politik akan berhenti dipengurus parpol atau anggota legislatif.

Setahu peneliti dalam kutipan buku dari panduan rekrutmen dan sistem kaderisasi partai politik ideal di Indonesia jenjang pengkaderan yang dimiliki partai politik di Indonesia berbeda beda, salah satunya studi kasus yang diangkat peneliti yakni partai PKS memiliki jenjang kader mulai dari tingkat madya, dewasa, ahli, dan puma. Sedangkan partai PKB belum diketahui secara pasti jenjang pengkaderan AD/ART partai.

e) Jenjang Pengkaderan

Ada 3 tahap dalam jenjang pengkaderan yakni tingkat pertama, tingkat madya dan tingkat utama. Jenjang pengkaderan merupakan pemberian materi dan ketrampilan untuk peserta kader serta hasil yang didapat dalam jenjang pengkaderan berupa peran mereka di internal dan eksternal partai ataupun perintah dalam menjalankan fungsi dan tugas partai politik.

*Kaderisasi tingkat pertama*, kaderisasi tingkat pertama lebih mengutamakan interalisasi berupa ideologi, visi, misi partai politik. Tujuan kaderisasi tingkat pertama menciptakan budaya dan penguatan tentang nilai nilai

partai politik untuk peserta kaderisasi, membekali ketrampilan administrasi dan tata kelola partai kepada anggota kader seperti pelaksanaan rapat, program, kampanye dan sebagainya terkait aktivitas partai politik. Tidak hanya pembekalan materi, pelatihan kaderisasi tingkat pertama juga memberikan masalah pelatihan kepemimpinan, strategi kemenangan pemilu, komunikasi politik dengan beberapa media. Kaderisasi tingkat pertama difokuskan pada sayap partai/ anggota partai politik yang diprediksikan menjadi pengurus partai tingkat daerah. Bagi kader yang diprediksikan menjadi pengurus partai/ badan perwakilan tingkat daerah maka pembekalan materi perlu ditambahkan seperti fungsi komunikasi politik, pengawasan, anggaran dan legislasi, pembuatan kebijakan dan evaluasi. Adapun penguasaan materi antara lain: dasar ideologi partai politik, sejarah partai politik, AD/ART partai politik, tata kelola partai politik ditingkat daerah, dinamika dan isu yang sewaktu waktu berkembang di daerah, pengetahuan tentang hubungan partai politik dan pemerintah di tingkat daerah, pengetahuan tentang keuangan partai politik dan pemerintahan di tingkat daerah, masalah kepemimpinan tingkat lokal, masalah pemilu dan strategi pemenangan di tingkat lokal, pengetahuan tentang hubungan media massa dll.

*Kaderisasi tingkat madya.* Kaderisasi tingkat madya dilakukan untuk melahirkan para pengurus partai, anggota DPRD ditingkat propinsi, jenjang kaderisasi tingkat ini dibekali dengan ilmu dan keterampilan mengenai komunikasi politik secara personal maupun interpersonal terkait pengorganisasian massa, kepemimpinan, keterwakilan politik dan solusi dari masalah, pembuatan kebijakan dan strategi kampanye. Pada jenjang ini lama waktu dan silabus modul dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan administrasi presentasinya lebih deai terkait masalah pemenangan pemilu. Dalam memajukan ketrampilan administrasi, jenjang kaderisasi tingkat madya dkhhususkan pada kontribusi partai politik untuk memenangkan pemilu dan para peserta kader diharuskan menguasai materi antara lain: tata kelola partai politik, dinamika dan isu yang sewaktu waktu tengah diperbincangkan di daerah, solusi

permasalahan terkait kebijakan di tingkat provinsi, proses pembuatan kebijakan di provinsi, pengetahuan tentang hubungan partai politik dan pemerintah di tingkat provinsi, pengetahuan tentang keuangan partai politik dan pemerintahan di tingkat provinsi, masalah kepemimpinan tingkat provinsi, masalah pemilu dan strategi pemenangan, pengetahuan tentang hubungan media massa, dan kemampuan dalam lobbying (kemampuan mempengaruhi seseorang atau kelompok yang memiliki kedudukan di pemerintahan sehingga memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan organisasi).

*Kaderisasi tingkat utama.* Kaderisasi tingkat ini difokuskan untuk calon pengurus partai politik dan anggota legislatif di tingkat pusat seperti calon presiden dan wakil presiden, pada kaderisasi ini pengetahuan yang dicakup tentang partai politik harus luas tidak hanya masalah internalisasi partai, kepemiluan, masalah peraturan pemilu, strategi pemenangan pemilu, namun juga harus mempelajari isu-isu dalam konteks nasional dan global seperti kebijakan partai ditingkat nasional, masalah lingkungan, pemahaman terhadap sistem ekonomi, pemerintahan, hukum dan hubungan internasional. Tak hanya itu para kader juga harus meningkatkan keterampilan kader dalam komunikasi politik, kepemimpinan, lobbying, negosiasi khususnya dalam kaderisasi tingkat utama seperti keterampilan dalam komunikasi publik, persoalan problem solving skill ditingkat nasional, meningkatkan pengetahuan tentang teknologi yang menyangkut persoalan media dll. Pengetahuan kaderisasi tingkat utama meliputi: Tata kelola partai politik di tingkat nasional, dinamika dan isu yang sewaktu waktu tengah diperbincangkan di tingkat nasional, solusi permasalahan terkait kebijakan di tingkat provinsi, proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional, proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional, pengetahuan tentang hubungan partai politik dan pemerintah di tingkat nasional dan global, pengetahuan tentang keuangan partai politik dan pemerintahan secara global, masalah kepemimpinan dan kemampuan komunikasi interpersonal, masalah pemilu dan strategi pemenangan di tingkat nasional, pengetahuan tentang hubungan media massa, dan kemampuan lobbying serta

negosiasi (untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok yang memiliki kedudukan di pemerintahan sehingga memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan organisasi, pemahaman tentang lingkungan strategis internasional, sistem ekonomi, hukum, pemerintahan, dan hubungan internasional.

f) Materi Kaderisasi

Materi materi kaderisasi meliputi: materi yang bertujuan untuk menambahkan pengetahuan, pemahaman dan ketangguhan sebagai anggota partai politik, materi yang berkesinambungan terhadap penciptaan kader partai yang memiliki jiwa tangguh, materi yang berkesinambungan terhadap persoalan kebangsaan dan nasionalisme, materi yang berkesinambungan terhadap demokrasi dan ideologi internal partai, materi yang berkesinambungan terhadap komunikasi baik politik maupun publik, materi yang berkesinambungan terhadap penyelenggara pemilu dan kemenangan pemilu, materi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana anggaran daerah, materi yang berkesinambungan terhadap fungsi legislasi dan penyusunan perpu daerah, materi yang berkesinambungan terhadap fungsi pengawasan dan perwakilan, materi yang berkesinambungan terhadap etika politik dan pemerintah, materi yang berkesinambungan terhadap lobbying, negosiasi, mekanisme konflik yang bersifat internal/ eksternal partai.

## B. Penelitian Terdahulu

Literature review atau penelitian terdahulu merupakan hal penting dalam membuat tulisan ilmiah, literature review berisi rangkuman, ulasan, pemikiran penulis dari pustaka jurnal, buku, bunga rampai, tulisan ilmiah, makalah, majalah dan artikel lepas yang berkaitan dengan tema pembahasan. Semua hasil penelitian berupa pernyataan yang bukan dari tulisan penulis harus disertakan sumbernya dari kutipan yang digunakan, pada penelitian ini penulis mengumpulkan dari referensi skripsi dan jurnal yang membahas rekrutmen kaderisasi partai politik. Oleh karena itu peneliti melakukan langkah kajian pada hasil penelitian dengan referensi dari jurnal dan skripsi yang dijelaskan penulis dibawah ini:



*Pertama*, tulisan dari Cholida Eka Anggraini, Joko Sutarso dan Budi Santosa (2014) dengan judul “Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP dan PKS kota Surakarta”. Fokus dari penelitian ini adalah strategi komunikasi politik dalam merekrut perempuan di partai PDIP dan PKS kota Surakarta kemudian melakukan perbandingan antara keduanya, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah studi kualitatif. Dan hasil penelitian yang diperoleh yakni strategi komunikasi yang dilakukan PDIP dan PKS menggunakan rapat inti pengurus dengan bentuk komunikasi keatas, penyebaran informasi kebijakan partai ketingkat bawah dalam struktur partai melalui koordinasi tiap wilayah dengan bentuk komunikasi kebawah, program dalam strategi komunikasi politik PDIP melalui program pemelihara kesehatan masyarakat solo/ PKMS dan bantuan pendidikan masyarakat kota Solo/ BPMS, PKS melalui program pos wanita keadilan/ PWK dan sejahtera study club dll, proses rekrutmen PDIP berupa penilaian, survey, riset tiap calon yang diusung, sesuai dengan pertimbangan dan pengabdian anggota di partai, sedangkan PKS menggunakan sistem internal kader disetiap daerah pemilihan<sup>9</sup>.

*Kedua*, penelitian dari Asep Ginanjar Maulana. F (2017) dengan judul “Rekrutmen Politik PPP dan PDIP Dalam Sistem Ketataan Indonesia Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan dewan pimpinan wilayah fraksi PPP dan fraksi PDIP yang tertelak di Jawa Barat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 tahun 2011 mengenai partai politik, kemudian menjelaskan faktor yang mempengaruhi dari rekrutmen tersebut sesuai undang undang partai politik. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif analitis pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen anggota dari kedua partai tersebut sama ditingkat DPW PPP Jawa Barat dan DPD PDIP Jawa Barat yang menggunakan 3 cara perekrutan yakni sosialisasi, bakti sosial dan aspirasi. Sedangkan dari faktor pendukung dan penghambat tidak jauh beda, dari faktor pendukung sama sama figur dan pemilih masih tradisional.

---

<sup>9</sup> Cholida Eka Anggraini, Joko Sutarso, and Budi Santosa, "Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP Dan PKS Kota Surakarta", *KomuniTi*, VI.2 (2014), 132–41. Hlm. 134.

Faktor penghambatnya terletak pada keterbatasan SDM, dana dan inovasi partai masih minim, untuk mekanisme rekrutmen politik secara UU belum lengkap dan menyeluruh serta kedua partai politik PPP, PDIP di Jawa Barat masih bersifat tertutup dan rasional<sup>10</sup>.

*Ketiga*, tulisan dari Chelsy Yessica (2018) dengan judul “Marketing Politik Rekrutmen Politisi Perempuan Di Provinsi Riau (Studi Kasus Partai Solidaritas Indonesia Dan Partai Nasional Demokrat)”, tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada 2 partai yakni PSI dan Demokrat yang berani mengusung tema politik tanpa mahar serta untuk mengetahui citra positif dan media komunikasi yang digunakan dalam merekrut anggota masing masing partai kemudian membandingkan antara keduanya. Dan hasil penelitian menjelaskan bahwasannya citra positif PSI di Riau mengutamakan keinovatifan dan keterbukaan bagi penggerak perempuan, sedangkan partai Demokrat menampilkan tema politik tanpa mahar untuk partai melalui keberhasilannya dan keteladanan sebagai pemulihan kedudukan untuk mempengaruhi perempuan Riau dan komunikasi media yang dilakukan kedua partai tersebut lebih unggul dan efektif<sup>11</sup>.

*Keempat*, tulisan Muhamad Alfika Firdani (2019), dengan judul “Metode Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Daerah Kota Salatiga (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Persatuan Pembangunan)”. Tulisan tersebut menggunakan studi kualitatif field research yang mencar sumber data langsung di lembaga partai, tulisan ini fokus pada kajian metode rekrutmen calon anggota legislatif dari partai islam PKB dan PPP di Salatiga sesuai dengan undang undang, AD/ART dan rekrutmen masing masing partai. Dan hasil penelitian menjawab terdapat perbedaan PKB dalam merekrut caleg menggunakan metode sosialisasi kepada kelompok pemuda, fatayat dan lain lain kemudian pendaftaran caleg dilakukan lembaga pemilu. Sedangkan PPP menggunakan metode door to door di rumah

---

<sup>10</sup> Asep Ginanjar Maulana F, "Rekrutmen Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik", 2017. Hlm. 3.

<sup>11</sup> Chelsy Yesicha, "Marketing Politik Rekrutmen Politisi Perempuan Di Provinsi Riau (Studi Kasus Partai Solidaritas Indonesia Dan Partai Nasional Demokrat)", *Jurnal Dakwah Risalah*, 29.2 (2019), 189 <<https://doi.org/10.24014/jdr.v29i2.6743>>. Hlm. 189

warga sesuai saran majelis pertimbangan partai oleh PAC dan latnas pemenangan pemilu PPP, persamaannya metode rekrutmen kedua partai tersebut tidak tertuang dalam AD/ART masing masing partai, rekrutmen caleg kedua partai tersebut belum sesuai regulasi aturan UU pemilu, KPU dan PKPU terkait pencalonan anggota dewan. Ketidaksesuaian rekrutmen tersebut karena tidak wajibnya caleg memiliki kartu identitas anggota partai<sup>12</sup>.

*Kelima*, penelitian dari Nola Mustika (2019), dengan judul “Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai PKS dan PDIP Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang”. Fokus dari penelitian ini adalah pada proses pencalonan anggota legislatif DPRD kota oleh fraksi PDIP dan PKS yang dimulai dari kandidasi caleg, tahapan pencalegan, dan kriteria partai politik dalam menjaring caleg. Dan hasil penelitian yang diperoleh rekrutmen PKS bersifat tertutup hanya merekrut dari bakal calon legislatif kader yang sesuai dengan kriteria AD/ART partai, bacaleg yang dipilih dan lolos dinilai dari keaktifan dan kontribusi di partai, dan berpengalaman dalam aktifitas politik. Sedangkan PDIP membuka kesempatan untuk semua bacaleg baik kader maupun non kader (tokoh masyarakat), baik orang yang belum/ pernah menjalin kerjasama dengan partai yang bersangkutan, asalkan bacaleg memiliki kualitas dan loyalitas dalam partai. Dalam arti hasil seleksi berdasarkan pada kemampuan dan loyalitas bacaleg, kesimpulannya PDIP memberikan kesempatan untuk semua orang mencalonkan diri sedangkan PKS hanya membuka seleksi dari kadernya<sup>13</sup>.

*Keenam*, penelitian dari Chendy Vicky Vigana (2019), yang berjudul “Partai Politik Dan Rekrutmen Politik (Studi Atas Rekrutmen Koalisi Partai Golkar Dan PPP Dalam Mengusung Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Di Kabupaten Demak Tahun 2015)”. Penelitian ini berfokus pada kajian rekrutmen politik kandidat pemilihan cabup dan cawabup yang diusung koalisi partai Golkar dan PPP di kabupaten Demak tahun 2015, yang permasalahannya alasan dari kedua partai tersebut

---

<sup>12</sup> Muhamad Alvika Firdani, "Metode Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Daerah Kota Salatiga (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Persatuan Pembangunan)", 2019. Hlm. 1

<sup>13</sup> N Mustika, "Perbandingan Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai PKS Dan PDIP Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Palembang", 2019, 1–123 <<http://repository.radenfatah.ac.id/10352/%0Ahttp://repository.radenfatah.ac.id/10352/1/gabungan.pdf>>.Hlm. 14.

mengusung pasangan cabup dan cawabup yang bukan berasal dari kader partai serta faktor yang mempengaruhi dalam kandidat tersebut. Sehingga peneliti tertarik dalam membahas kajian tersebut karena kurangnya wawasan terhadap rekrutmen kandidat politik dalam mengisi jabatan pemerintahan, penelitian tersebut menggunakan kualitatif analisis deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tersebut kedua partai tersebut memiliki hambatan secara internal dan eksternal di mana kedua partai tersebut tidak memiliki komitmen dalam mengusung masing masing kadernya untuk layak mengisi jabatan di kontestasi pilkada<sup>14</sup>.

*Ketujuh*, tulisan dari Abidzar Alghifari (2019) dengan judul “Perbandingan Sistem Kaderisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Era Hamzah Haz Dan Abdul Hadi Awang”. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif dan studi pustaka yang berfokus pada kajian dalam penelitian pola rekrutmen kader 2 partai islam yakni PPP dan PAS di era Hamzah Haz dan Abdul Hadi Awang sesuai dengan konsep kaderisasi dan partai politik. Penelitian ini untuk mengetahui regenerasi kader partai selanjutnya, yang tentunya setiap partai politik memiliki kaderisasi yang berbeda beda. Dari hasil penelitian kedua partai PPP dan PAS memiliki rekrutmen yang sama sistematis dan terstruktur, kedua partai tersebut juga mengandalkan gerakan organisasi sayap partai dalam merekrut anggota. PPP dalam era Hamzah Haz dan Abdul Hadi Awang yang merupakan kader NU cukup berhasil dalam meregenerasi partai dikalangan wanita dengan menggerakkan organisasi sayap partai yakni wanita persatuan pembangunan pada pemilu 2004 dan memperoleh suara terbanyak dari kalangan NU. Begitupun juga PAS di era Hamzah Haz dan Abdul Hadi Awang berhasil merubah rekrutmen partai yakni membuka peluang untuk non muslim bergabung di partai PAS serta berhasil mendirikan organisasi non muslim untuk mendukung partai islam se Malaysia<sup>15</sup>.

*Kedelapan*, tulisan dari Ridho Ferdian, Robi Cahyadi Kurniawan, Sigit Krisbiantoro, Himawan Indrajat (2020) dengan judul “Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai”.

---

<sup>14</sup> Cendhy Vicky Vigana, "Partai Politik Dan Rekrutmen Politik (Studi Atas Rekrutmen Koalisi Partai Golkar Dan Ppp Dalam Mengusung Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Di Kabupaten Demak Tahun 2015)", 2019. Hlm. 5.

<sup>15</sup> Abidzar Al Ghifari, "Perbandingan Sistem Kaderisasi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Dan Parti Islam Se-Malaysia ( PAS ) Era Hamzah Haz Dan Abdul Hadi Awang", 2019. Hlm. 3

Tulisan tersebut mengkaji tentang model kaderisasi yang dilakukan oleh 2 partai nasionalis yakni Gerindra, Nasdem, dan 1 partai islam PKS, melalui organisasi sayap partai yang menjaring kader dari kalangan yang berbeda beda sehingga dapat mempengaruhi model dari kaderisasi masing masing partai, penelitian tersebut menggunakan studi kualitatif atas dasar prinsip kaderisasi sesuai aturan KPK. Fokus dari penelitian tersebut terletak pada kaderisasi setiap ormas masing masing partai dari organisasi sayap partai Gerindra bernama GMD/ Gerindra Masa Depan, organisasi sayap partai Nasdem bernama Garda Pemuda Nasdem, dan organisasi sayap partai PKS bernama Garuda Keadilan. Ketiga partai tersebut tentu memiliki visi dan misi yang berbeda, dari hasil penelitian menyimpulkan kaderisasi partai Gerindra dan Nasdem bersifat terbuka dan berjenjang, kedua partai tersebut tidak ada batasan dalam merekrut kader semua mendapatkan pelatihan yang sama. Sedangkan PKS menggunakan sistem tertutup, PKS merekrut calon anggota kader yang memiliki bekal religious dan islami dengan model kaderisasi berjenjang<sup>16</sup>.

*Kesembilan*, tulisan dari Wahyu Herriansyah Putra tahun 2020 dengan judul “Pola Kaderisasi Politik Melalui Sayap Partai Perempuan (Studi Kasus Perbandingan Partai Golkar Dan Partai Nademkota Semarang)”. Penelitian ini memfokuskan pada kajian proses kaderisasi anggota partai perempuan dalam sistem pemikiran dan strategi masing masing partai serta hambatan yang didapatkan dalam organisasi sayap partai Golkar bernama Kesatuan Perempuan Partai Golkar/ KPPG, dan partai Nasdem bernama Garda Wanita Malahayati di kota Semarang. Penelitian diatas menjawab analisis menggunakan studi kualitatif, dengan hasil penelitian bahwasannya proses kaderisasi partai tidak berpola, kedua partai tersebut memiliki kesamaan dalam fungsi dan prosesnya yakni memperbanyak anggota dan sebagai pelengkap dalam organisasi sayap partai perempuan baik partai Golkar maupun Nasdem. Dan hambatan yang terjadi dalam pembentukan sayap partai pada perempuan adalah terbatasnya wewenang sehingga kaderisasi kurang maksimalsehingga

---

<sup>16</sup> Ridho Ferdian dkk, "Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai", *Wacana Publik*, 14.01 (2020), 35–40 <<https://doi.org/10.37295/wp.v14i01.39>>. Hlm. 35.



berdampak pada gagalnya para kader untuk keterwakilan perempuan di legislatif<sup>17</sup>.

*Kesepuluh*, tulisan dari Sapiah (2020), dengan judul “Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Menurut UU No. 2 Tahun 2008 Di Provinsi Jambi (Studi Kasus PDIP Dan PPP Tahun 2016-2020)”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus tulisan mengkaji perbandingan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif antara fraksi PDIP dan PPP Provinsi Jambi, dan hasil penelitian telah menjawab bahwasannya kuota 30% untuk keterwakilan perempuan kedua partai sudah terpenuhi. Namun sebagian dari partai seperti PDIP jumlah perempuan dalam menduduki jabatan yang strategis belum terpenuhi, sedangkan dari PPP jumlah kursi sudah terpenuhi. Dapat ditarik kesimpulan yang artinya ada suatu partai yang hanya sekedar memenuhi tuntutan peraturan UU dan ada juga partai yang membutuhkan kerja peran, tenaga, pikiran untuk membesarkan partai<sup>18</sup>.

Dari kesepuluh hasil penelitian terdahulu yang telah dikelompokkan diatas, penulis akan mempertimbangkan referensi tersebut untuk dijadikan sebagai data pendukung bagi peneliti, dengan membuat persamaan dan perbedaan dari literature review yang telah ditulis. Berdasarkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama menelaah tentang 2 rekrutmen partai politik kemudian membandingkan perbedaan dari masing masing partai yang diangkat baik partai nasionalis maupun partai islam, kemudian persamaan lainnya adalah menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga mendapatkan data penelitian yang komperhensif.

Selanjutnya mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ditemukan pada pemilihan tempat penelitian, fokus penelitian, perbandingan dari studi kasus, dan hasil penelitian. Pada penelitian ini tempat yang dipilih adalah 2 partai islam yakni PKB dan PKS di kabupaten Grobogan, fokus penelitian pada open rekrutmen dan kaderisasi 2 partai islam tersebut, dan untuk perbandinganya pada rekrutmen dan sistem kaderisasi 2 studi kasus yang diangkat. Sedangkan untuk

---

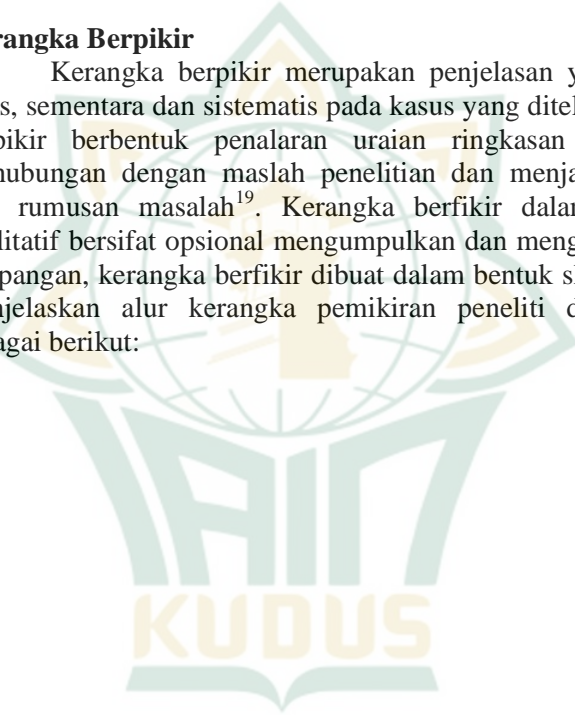
<sup>17</sup> Wahyu Herriansyah Putra, “Pola Kaderisasi Politik Melalui Sayap Partai Perempuan (Studi Kasus Perbandingan Partai Golkar Dan Partai Nademkota Semarang)”, *Journal of Politic and Government Studies*, 9.4 (2020), hlm. 1.

<sup>18</sup> Sapiah, "Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik Menurut Uu No. 2 Tahun 2008 Di Provinsi Jambi (Studi Kasus PDIP Dan PPP Tahun 2016-2020)", 2020, 1–66 <[Http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf](http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf)>. Hlm. 6.

literature reviewnya pemilihan tempat sangat berbeda tempat penelitian yang dipilih adalah dari partai nasionalis dan islamis seperti PPP dengan PDIP, Golkar, Nasdem dll. Selain itu fokus penelitian yang diangkat terdapat pada rekrutmen politik calon legislatif dari 2 partai pengusung, koalisi 2 partai dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, rekrutmen dan kaderisasi perempuan di partai politik, strategi rekrutmen politik dalam pemenangan caleg dll, serta perbandingan fokus penelitian dari partai nasionalis dan islamis.

### C. Kerangka Berpikir

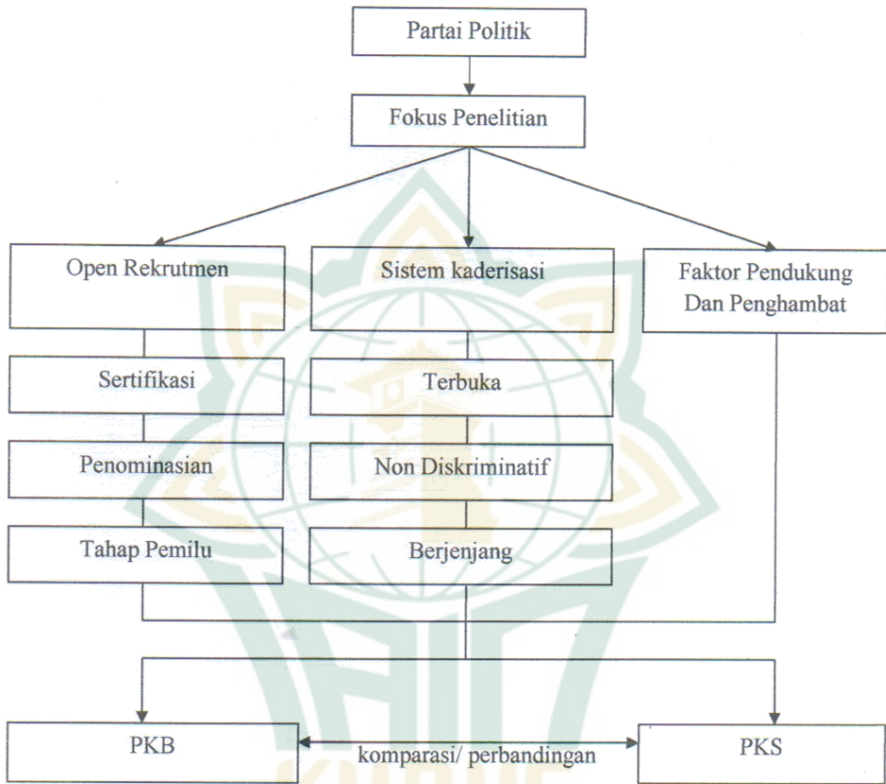
Kerangka berpikir merupakan penjelasan yang bersifat logis, sementara dan sistematis pada kasus yang diteliti, kerangka berpikir berbentuk penalaran uraian ringkasan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dari rumusan masalah<sup>19</sup>. Kerangka berfikir dalam penelitian kualitatif bersifat opsional mengumpulkan dan menganalisis data dilapangan, kerangka berfikir dibuat dalam bentuk skema. Untuk menjelaskan alur kerangka pemikiran peneliti dapat dilihat sebagai berikut:



---

<sup>19</sup> Dewi Sadiah, “*Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Posdakarya, 2015), hlm. 70-71.

Open Rekrutmen dan Sistem Kaderisasi Partai Islam (Studi Komparasi DPC PKB dan DPD PKS di Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2021)



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Gambar tersebut menunjukkan bahwa hasil dari penelitian tersebut menjelaskan perbandingan antara 2 partai islam yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Grobogan berdasarkan dari open rekrutmen, sistem kaderisasi, faktor yang mempengaruhi perekrutan kader baik faktor pendorong dan penghambat dari pengkaderan 2 partai islam tersebut.